

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
(Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik**

ADMINISTRASI PUBLIK



Oleh:

MARGARETA NOVI YANTI

Nim: 2017210086

**KONSENTRASI MANAJEMEN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2021

RINGKASAN

Kemiskinan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan negara berkembang termasuk Indonesia. Salah satu cara untuk mengatasi masalah kemiskinan diantaranya dengan memberikan uang tunai kepada RTM melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Selama pelaksanaan PKH, sektor jasa sosial berperan dalam menyukseskan PKH. Adapun salah satu fungsi peran dinas sosial sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk dapat memperhatikan sebuah program ini, karena adanya program inilah secara langsung akan dapat mengetahui sejauh mana sebuah pencapaian dalam program yang ada. Adapun dalam penelitian ini ialah menggunakan sebuah metode deskriptif kualitatif, salah satu teknik dalam menentukan informan ialah menggunakan *Snowball Sampling*. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran Dinsos dan faktor pendukung serta penghambat PKH. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di dinas sosial yang ada di Kota Batu merupakan sebuah kementerian yang berperan sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Sosial telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar, yang sejalan berlandaskan dengan tujuan Program Keluarga Harapan yang mana secara langsung akan dapat mengganjal terkait dengan kemiskinan serta dapat memaksimalkan pada tingkat kualitas SDM. Masyarakat miskin dapat memberikan sebuah peran yang sangat terpenting untuk mendorong serta dapat membimbing desa dalam melaksanakan yang namanya PKH sebagaimana dapat memberikan pelayanan atas pendidikan, kesehatan serta tingkat kesejahteraan terhadap masyarakat yang masih kurang dalam hal ini miskin.

Kata Kunci : Peran. Pemberdayaan, Program Keluarga Harapan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sebuah negara yang dikatakan sudah maju salah satu ialah Negara RI, memang memiliki banyak potensi sumber daya alam untuk mengangkat negara dan rakyatnya dari kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat-sangat serius yang masih dihadapi oleh beberapa negara di dunia, sehingga pemerintah merumuskan strategi atau rencana untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Badan Statistik Pusat Jawa Timur pada tahun 2020 menyatakan bahwa tingkat kemiskinan pada berada di Provinsi Jawa Timur mencapai 4419,10 ribu orang atau dengan tingkat persentase mencapai 11,09% sebagaimana meningkat mencapai 363,1 ribu orang yang mana akan dapat diadakan perbandingan terhadap situasi di tahun 2019 mencapai 10,20% atau mencapai 4.056,00 ribu orang. Kemiskinan meningkat karena keberadaan pandemi Covid19 yang berasal dari 20 Februari 20. Munculnya Covid19 hampir mempengaruhi beberapa bidang kehidupan mulai dari bidang ekonomi serta dari sektor kesehatan.

Oleh sebab itu dalam menghambat pada problem yang ada, pihak pemerintah harus berupaya mencari kebijakan untuk menekan angka kemiskinan. adapun beberapa metode yang perlu diterapkan dalam mengganjal tingkat kemiskinan ini adalah dengan mampu untuk memperkenalkan berbagai jenis kebijakan yang dalam bentuk sumbangan atau bantuan yang secara langsung terhadap rumah tangga miskin berlandaskan pada program PKH (Program Keluarga Harapan). PKH (Program Keluarga Harapan) dapat dikatakan sebagai salah satu aktivitas program yang dilakukan oleh pihak pemerintah sebagaimana memberikan sebuah dampak yang sangat signifikan terhadap keberlanjutan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa mendatang. Adapun maksud serta tujuan dari program ini ialah

secara langsung dapat memangkas pada tingkat kemiskinan serta dapat memaksimalkan pada aspek kualitas SDM pada kalangan masyarakat.

PKH (Program Keluarga Harapan) pada mulanya dibuat oleh pihak pemerintahan di Republik ini tepat pada Tahun 2007 dengan beberapa daerah yakni provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, NTT serta DKI Jakarta, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Uji coba di daerah diatas bertujuan agar pemerintah tahu seberapa efektif dan efisien dalam membantu masyarakat kecil.

Menurut pasal 3 Permensos nomor 1 tahun 2018, tujuan utama PKH (Program Keluarga Harapan) ialah masyarakat atau keluarga dalam kategori tidak mampu dan tercatat pada sebuah program pendataan terpadu pengentasan penduduk miskin, yang meliputi kesejahteraan, pendidikan serta kesehatan. Penerima manfaat dari program ini ialah keluarga yang mana belum mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak, seperti tidak mampu menyekolahkan anaknya karena tidak mampu, dan keluarga yang mengizinkan pasien dirawat di rumah karena tidak memiliki uang untuk membawa mereka ke rumah sakit untuk perawatan. Penerima bantuan PKH wajib melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan dan/atau tenaga medis untuk ibu hamil dan menyusui, menyekolahkan anak dan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak.

Tujuan umum PKH (Program Keluarga Harapan) ialah untuk secara langsung dapat meminimalkan pada tingkat kuantitas serta dapat menghambat pada tingkat kemiskinan, serta mampu untuk memaksimalkan pada tingkat kualitas SDM serta pengembangan sebuah karakter tidak mensejahterakan masyarakat yang tidak mampu. Dimana adapun fungsi dari PKH (Program Keluarga Harapan) ialah sebagai berikut : (a) memaksimalkan pada aspek kualitas pendidik, (b) memaksimalkan aksesibilitas pada aspek kesehatan dan (c) memaksimalkan pada aspek derajat gizi ibu hamil (Kementerian RI Sosial, 2013: 14).

Sebagaimana dalam melakukan PKH (Program Keluarga Harapan) adapun sebuah peran yang sangat terpenting dari dinas sosial yang merupakan salah satu agen untuk mensukseskan PKH

(Program Keluarga Harapan). Layanan sosial adalah unit pemerintah di sektor sosial yang mengelola praktik yang secara profesional dalam mendorong serta membantu individu, untuk meningkatkan atau meningkatkan kapasitas mereka untuk berfungsi secara sosial dan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi acara komunitas sebagaimana dapat memungkinkan mereka dalam menggapai sebuah maksud serta tujuan. Adapun sebuah pekerjaan sosial sama sekali tidak jauh berbeda dengan pekerjaan sosial ialah secara langsung akan dapat mendorong orang dalam memaksimalkan daya kemampuan yang jauh lebih efektif dalam menyelesaikan tugas berkehidupan serta dapat membantu masalah yang dihadapinya.

Peran Dinas Sosial harus benar-benar diperhatikan dalam melaksanakan sebuah program, hal ini disebabkan karena berdasarkan dengan program ini secara langsung akan dapat dilihat sejauh mana standar program yang dicapai. untuk dapat mengembangkan masyarakat serta keluarga berlandaskan pada sebuah program penanggulangan pada aspek PKH (Program Keluarga Harapan).

Hal ini memerlukan konsultasi dengan organisasi pemerintah dan lembaga terkait dengan aspek kesejahteraan serta kualitas hidup mereka. Peran dinas sosial dalam pelaksanaan PKH harus mampu membawa perubahan cara hidup, sikap dan perilaku yang berkaitan dengan dunia pendidikan, dan diharapkan akan terjadi peningkatan kesehatan, kesehatan tersedia secara luas. . berdampak pada masyarakat di wilayah dimana program PKH dilaksanakan.

Di Indonesia juga ada beberapa daerah yang mendapat dukungan dari PKH. Salah satunya berada pada Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Seperti diketahui, jumlah peserta yang mendapatkan bantuan PKH di kota Batu pada tahun 2019 sebanyak 3.161 orang, sedangkan pada tahun 2020 jumlah peserta PKH KPM bertambah dari 100 orang menjadi 3.261 orang. Jumlah yang dicairkan sebesar Rp 10,5 miliar. Trihana, Koordinator Bidang PKH Dinas Sosial Kota Batu, mengatakan bantuan PKH yang ditangguhkan lebih besar dari dana pendidikan Rp 4,3 miliar, sedangkan di bidang kesehatan angkanya mencapai Rp 1,7 miliar dan kesejahteraan

masyarakat meningkat. Rp 3,6 miliar, papar Trihana sebagai Koordinator Bidang PKH Dinas Sosial Kota Batu, (Suryamalang.Com, Batu 2019).

Dalam penelitian ini peneliti akan berfokus pada peran salah satu lembaga dinas sosial dalam melaksanakan pemberdayaan seluruh masyarakat berlandaskan pada aspek PKH (Program Keluarga Harapan) dan sejauh mana pada golongan dinas sosial melaksanakan PKH sehingga PKH ini dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Serta faktor apa saja yang menghambat serta mendorong dalam mengupayakan pada aspek pemberdayaan masyarakat melalui PKH (Program Keluarga Harapan).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh) Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu**”.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang yang ada, sehingga dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan diangkat ialah antara lain :

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran dinas sosial dalam pemberdayaan Masyarakat melalui program Program Keluarga Harapan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dipaparkan pada rumusan masalah yang ada, sehingga dalam riset ini tujuan penelitian yang akan diangkat ialah antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dinas sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan di Kota Batu
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran dinas sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan di Kota Batu.

1.4. **Manfaat Penelitian**

Sebagaimana telah dipaparkan pada tujuan peneliti yang ada, sehingga dalam penelitian ini manfaat penelitian yang akan diangkat ialah antara lain :

1. **Manfaat Teoritis**

penelitian ini sangat diharapkan dalam memaksimalkan pengetahuan serta ilmu, melalui penelitian ini dapat dijadikan sebuah pola pikir dalam mengembangkan pemahaman terhadap penelitian yang lain dengan tujuan untuk memaksimalkan pada sistem kinerja dinas sosial dalam memberdayakan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan di Kota Batu

2. **Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini secara langsung dapat digunakan sebagai referensi dalam pertimbangan pemerintah untuk mengatasi masalah dan memberikan informasi tentang pemberdayaan masyarakat melalui Program Harapan Keluarga (PKH) di kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2020. *Jumlah Keluarga Miskin Di Jawa Timur*
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mukarom, Zaenal. Dkk . 2018. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Cv Pustaka Setia
- Mulyadi.Deddy.Dkk. *Aministrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong J. Lexy, 2017.*Metododologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Najiyati, S., Asmara, dan Suryadiputra. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat Di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands Internasional – Indonesia Programme dan wildlife
- Pemensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
- Pemendagri RI Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
- Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia No 42/HUK/2007 Tentang Keluarga Harapan
- Sugiyono, 2015.*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono, 2016.*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Syafari, Agus. 2014. *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik